

ABSTRACT

Illegal logging is bad for the environment, because it can cause damage to the environment and detrimental to the country. The criminal fines imposed by the judge against the decision of cases of illegal logging is very high, but not yet provide a deterrent effect against perpetrators for criminal penalties that are not paid may be replaced by imprisonment, so that the necessary criminal law policy related to criminal fines are not paid within the crime of illegal logging in the context of prevention and enforcement of criminal law.

Based on the above background, the authors formulate some problems, namely the policy of the criminal law against criminal fines are not paid within verdict criminal case of illegal logging in the District Court of Bojonegoro and criminal law policy of the criminal fines that are not paid in case of illegal logging activities in the criminal law reform to come. The purpose of this study was to describe, examine, and analyze the criminal law policy of the criminal fines are not paid within verdict criminal case of illegal logging in the District Court of Bojonegoro and criminal law policy of the criminal fines that are not paid on a criminal case on illegal logging in criminal law reform to come.

The method used in this study is *juridical sociological*. Specifications of this research is *descriptive analysis*, which is expected to give a detailed description, systematic, and thorough on all matters relating to the object to be examined. The data used in this study are primary data and secondary data, data obtained through interviews and literature of materials collected through the study of literature, which is then *analyzed qualitatively*.

The conclusion from this study is that the policy of the criminal law against criminal fines are not paid in a case of illegal logging activities set out in Article 30 of the Criminal Code hamper the country to seize the proceeds of crime. Another weakness is in the legislation governing the crime of illegal logging, there is no provision regulating mechanism if fines are not paid. Policy criminal law against the criminal penalties that are not paid in case of illegal logging activities in criminal law reform to come, can be observed in the Draft Criminal Code of 2014. In order to reform the criminal law policy in illegal logging activities, then Indonesia can imitate the Law Against Illegal Logging Australia, Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) in the Voluntary Partnership Agreement (VPA) in the European Union, the Lacey Act in the United States, set a serious criminal or follow the example of the Criminal Code of the Netherlands, France, Greece, and Switzerland where the Criminal Code The countries have included provisions when criminal fines are not paid.

Keywords : *Policy Criminal Law, Criminal Fines, and Illegal Logging*

ABSTRAK

Tindak pidana pembalakan hutan (*illegal logging*) berdampak buruk bagi lingkungan, karena dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan merugikan negara. Pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim terhadap putusan perkara *illegal logging* sangat tinggi, akan tetapi belum memberikan efek jera terhadap pelaku karena pidana denda yang tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan, sehingga diperlukan kebijakan hukum pidana terkait pidana denda yang tidak dibayar dalam tindak pidana *illegal logging* dalam rangka penanggulangan dan penegakan hukum pidana.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu kebijakan hukum pidana terhadap pidana denda yang tidak dibayar dalam putusan perkara tindak pidana *illegal logging* di Pengadilan Negeri Bojonegoro serta kebijakan hukum pidana terhadap pidana denda yang tidak dibayar pada perkara tindak pidana *illegal logging* dalam pembaharuan hukum pidana yang akan datang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menelaah, dan menganalisis mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pidana denda yang tidak dibayar dalam putusan perkara tindak pidana *illegal logging* di Pengadilan Negeri Bojonegoro serta kebijakan hukum pidana terhadap pidana denda yang tidak dibayar pada perkara tindak pidana *illegal logging* dalam pembaharuan hukum pidana yang akan datang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridic sociology*. Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara *kualitatif*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan hukum pidana terhadap pidana denda yang tidak dibayar dalam perkara tindak pidana *illegal logging* yang diatur dalam Pasal 30 KUHP menghambat negara untuk menyita hasil tindak pidana. Kelemahan lain adalah dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana *illegal logging*, tidak terdapat ketentuan yang mengatur mekanisme bila denda tidak dibayar. Kebijakan hukum pidana terhadap pidana denda yang tidak dibayar pada perkara tindak pidana *illegal logging* dalam pembaharuan hukum pidana yang akan datang, dapat dicermati pada RUU KUHP 2014. Untuk pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana *illegal logging*, maka Indonesia dapat mencontoh Undang-Undang Anti *Illegal Logging* Australia, *Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)* dalam *Voluntary Partnership Agreement (VPA)* di Uni Eropa, *Lacey Act* di Amerika Serikat, menetapkan pidana yang berat maupun mencontoh KUHP dari negara Belanda, Perancis, Yunani, dan Swiss di mana KUHP negara tersebut telah mencantumkan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar.

Kata kunci : *Kebijakan Hukum Pidana, Pidana Denda, dan Illegal Logging*